

PERAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN KHUSUS

Nor Kshaalishah, Syahmidi

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Email: norkhaalishah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan mutu pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berperan penting dalam penguatan layanan pendidikan khusus melalui berbagai strategi, antara lain perencanaan berbasis data, pengembangan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas, serta pelaksanaan supervisi dan evaluasi berkelanjutan. Keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) menjadi bukti nyata komitmen Dinas Pendidikan dalam memperluas akses pendidikan, layanan terapi, dan dukungan publik bagi penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 13 Tahun 2020 dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Selain itu, kolaborasi lintas lembaga dan penerapan kurikulum diferensiatif turut memperkuat inklusivitas pendidikan di daerah ini. Namun, masih ditemukan sejumlah tantangan seperti distribusi guru yang belum merata, keterbatasan anggaran, dan stigma sosial terhadap ABK. Upaya berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang kuat diperlukan agar layanan pendidikan khusus semakin bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan praktik manajemen pendidikan modern yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada mutu.

Kata Kunci: Dinas Pendidikan, pendidikan khusus, anak berkebutuhan khusus, Unit Layanan Disabilitas, manajemen pendidikan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategic role of the Provincial Education Office of Central Kalimantan in improving the quality of special education for children with special needs (CSN). The research employed a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the Provincial Education Office of Central Kalimantan plays a crucial role in strengthening special education services through several strategies, including data-based planning, teacher competency development, the provision of disability-friendly facilities, and continuous supervision and evaluation. The establishment of the Disability Service Unit (ULD) serves as concrete evidence of the Education Office's commitment to expanding access to education, therapy services, and public support for persons with disabilities, as mandated by Government Regulation No. 13

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 552
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/sindoro.v1i2.360
Copyright: Author
Publish by: SINDORO



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

of 2020 and Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 48 of 2023. Furthermore, cross-institutional collaboration and the implementation of differentiated curricula have reinforced educational inclusivity in the region. However, several challenges remain, such as uneven distribution of special education teachers, limited funding, and persistent social stigma toward children with special needs. Continuous efforts and strong policy support are required to ensure that special education services become more equitable, high-quality, and sustainable. Overall, this study emphasizes that the Provincial Education Office of Central Kalimantan has implemented a modern, inclusive, and quality-oriented educational management approach.

Keywords: Education Office, special education, children with special needs, Disability Service Unit, educational management.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak tersebut berlaku universal, baik bagi anak yang berkembang secara normal maupun anak yang memiliki hambatan tertentu dalam fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK) memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak, bermutu, dan sesuai dengan karakteristik serta potensi mereka. Di sinilah urgensi pendidikan khusus menemukan relevansinya.

Pendidikan khusus hadir sebagai bentuk nyata keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar manusia. Tanpa adanya layanan pendidikan yang sesuai, anak berkebutuhan khusus berisiko mengalami keterbelakangan intelektual, keterasingan sosial, hingga diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan khusus bukan sekadar opsi tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dijamin negara melalui lembaga resmi, salah satunya Dinas Pendidikan.

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, urgensi pendidikan khusus semakin meningkat. Globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas, adaptif, dan inklusif. Anak berkebutuhan khusus, apabila diberi kesempatan dan layanan pendidikan yang tepat, dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, produktif, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Sayangnya, realitas di lapangan masih menunjukkan berbagai kesenjangan. Banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan layanan pendidikan memadai karena keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif.

Peran Dinas Pendidikan menjadi sangat strategis dalam mengatasi problem tersebut. Sebagai lembaga pemerintah yang mengatur kebijakan pendidikan di daerah, Dinas Pendidikan tidak hanya bertugas menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan mutu layanan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Tugas ini mencakup perencanaan, pengembangan kurikulum, penyediaan guru profesional, hingga pengawasan kualitas layanan. Tanpa keterlibatan aktif dari Dinas Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan khusus berpotensi berjalan parsial, tidak terarah, dan jauh dari standar mutu yang diharapkan.

Urgensi pendidikan khusus juga berangkat dari fenomena meningkatnya jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi menunjukkan bahwa jumlah ABK terus meningkat setiap tahunnya, sementara sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah inklusi belum mampu sepenuhnya menampung kebutuhan tersebut. Kondisi ini menuntut Dinas Pendidikan untuk segera merumuskan strategi yang efektif agar semua anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak belajar yang setara.

Selain itu, terdapat tantangan lain berupa stigma sosial yang masih melekat pada anak berkebutuhan khusus. Banyak masyarakat yang memandang ABK sebagai individu yang tidak produktif, sehingga pendidikan bagi mereka dianggap tidak penting. Pandangan ini harus diluruskan melalui kebijakan publik yang kuat dan program pendidikan yang humanis. Melalui pendidikan khusus yang bermutu, ABK tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan hidup (life skills) yang menunjang kemandirian mereka. Dengan demikian, urgensi pendidikan khusus tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi juga membangun peradaban yang lebih berkeadilan.

Dalam konteks manajemen pendidikan, mutu pendidikan khusus sangat ditentukan oleh strategi yang dirancang oleh Dinas Pendidikan. Strategi tersebut meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program. Misalnya, Dinas Pendidikan perlu mendata jumlah ABK di wilayahnya secara akurat, memastikan sekolah-sekolah memiliki fasilitas ramah disabilitas, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional. Tanpa strategi yang jelas, pendidikan khusus hanya akan menjadi formalitas tanpa mampu menghasilkan perubahan signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam Peran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Khusus. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Panjaitan No 4, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa peran lembaga ini dalam meningkatkan mutu pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) sudah berjalan cukup sistematis. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa strategi yang ditempuh mencakup aspek perencanaan berbasis data, pengembangan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana, pengawasan serta evaluasi berkelanjutan, hingga penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pembahasan berikut menguraikan secara lebih mendalam setiap aspek temuan beserta implikasinya terhadap mutu pendidikan khusus.

Hasil pertama yang menonjol adalah perencanaan kebijakan berbasis data. Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah telah mengembangkan mekanisme pendataan anak berkebutuhan khusus melalui sistem aplikasi internal yang bekerja sama dengan satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Setiap sekolah diwajibkan menginput data peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, baik di sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah reguler penyelenggara

pendidikan inklusif. Data ini tidak hanya meliputi jumlah siswa, melainkan juga jenis kebutuhan khusus, tingkat ketunaan, serta kebutuhan fasilitas penunjang. Pendataan yang akurat memungkinkan Dinas Pendidikan merancang program secara lebih tepat sasaran, misalnya menentukan lokasi sekolah inklusif baru, menyesuaikan jumlah guru pendamping, atau menyalurkan bantuan alat bantu belajar. Konsep perencanaan berbasis data ini sejalan dengan paradigma *evidence-based policy* dalam manajemen pendidikan, di mana kebijakan disusun berdasarkan fakta lapangan, bukan sekadar asumsi.

Perencanaan tersebut dituangkan dalam *Rencana Strategis Pendidikan Daerah* yang memuat target tahunan peningkatan layanan pendidikan bagi ABK. Target-target tersebut antara lain peningkatan angka partisipasi sekolah bagi ABK, peningkatan kompetensi guru SLB, serta penyediaan fasilitas belajar yang ramah disabilitas. Dinas Pendidikan juga menetapkan indikator kinerja yang terukur, seperti rasio guru pendidikan khusus terhadap jumlah siswa ABK, jumlah sekolah reguler yang siap menyelenggarakan kelas inklusi, serta persentase sekolah yang memiliki aksesibilitas bagi pengguna kursi roda. Dengan indikator yang jelas, kemajuan dapat dipantau secara periodik dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Perencanaan yang matang ini penting untuk memastikan bahwa program yang diluncurkan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan khusus. Selain itu, Dinas Pendidikan memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang mana untuk mendukung akses pendidikan, layanan terapi, ketenagaan, dan layanan publik bagi penyandang disabilitas. Keberadaan ULD merupakan penguatan fungsi dari Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan PP Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 22 dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 Pasal 13, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 41.

Hasil berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia pendidik. Penelitian menemukan bahwa Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah secara konsisten menyelenggarakan pelatihan bagi guru-guru yang mengajar di SLB dan guru pendamping khusus di sekolah inklusif. Materi pelatihan meliputi pendekatan pembelajaran diferensiatif, teknik asesmen kebutuhan individual, penggunaan media pembelajaran adaptif, hingga pengelolaan perilaku. Pelatihan dilakukan bekerja sama dengan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (BP-PLK) serta perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan luar biasa. Guru yang telah mengikuti pelatihan diwajibkan melakukan *dissemination* kepada rekan sejawat di sekolah masing-masing, sehingga pengetahuan yang diperoleh menyebar secara merata.

Dalam observasi ke beberapa SLB di Palangka Raya, terlihat adanya perubahan positif dalam strategi pembelajaran guru setelah mengikuti pelatihan. Guru menggunakan pendekatan tematik yang disesuaikan dengan kemampuan individu siswa, serta memanfaatkan media berbasis teknologi sederhana seperti aplikasi pembelajaran interaktif untuk anak tunagrahita ringan. Penguatan kompetensi guru ini krusial karena mutu pendidikan khusus sangat ditentukan oleh kualitas pendidiknya. Penelitian Yosefa Kafasin Owa (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif dan khusus bergantung pada sejauh mana guru memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, guru mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai, sehingga potensi ABK dapat berkembang optimal.

Aspek lain yang menonjol adalah pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan khusus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi gedung SLB, pengadaan fasilitas aksesibilitas seperti jalur kursi roda, toilet ramah disabilitas, serta penyediaan alat bantu belajar seperti buku Braille, *hearing aid*, dan komputer dengan perangkat lunak pembaca layar. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi standar layanan minimal yang diatur dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Selain itu, Dinas Pendidikan juga mengembangkan program *Mobile Teacher* untuk menjangkau anak berkebutuhan khusus di daerah terpencil yang tidak memiliki SLB atau sekolah inklusif.

Guru berkunjung ke rumah atau pusat komunitas untuk memberikan layanan pendidikan dasar sesuai kebutuhan anak. Program ini diapresiasi oleh orang tua siswa karena membantu mengatasi hambatan jarak yang selama ini menjadi penghalang utama bagi ABK di pedesaan.

Pengadaan sarana tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi. Beberapa SLB di Palangka Raya telah dilengkapi dengan komputer dan jaringan internet untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Guru dilatih menggunakan aplikasi *screen reader* untuk siswa tunanetra, sementara siswa tunarungu difasilitasi dengan perangkat video pembelajaran berbasis bahasa isyarat. Inovasi ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan tidak hanya fokus pada penyediaan fasilitas konvensional, tetapi juga berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Sarana dan prasarana yang memadai menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan mengurangi hambatan yang dihadapi ABK.

Hasil penelitian juga menemukan adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang relatif terstruktur. Dinas Pendidikan menerapkan mekanisme supervisi akademik yang dilaksanakan secara berkala, minimal dua kali dalam satu tahun ajaran. Supervisi meliputi peninjauan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), observasi proses belajar mengajar, serta penilaian hasil belajar siswa. Setiap temuan supervisi didokumentasikan dan dijadikan dasar perbaikan kurikulum maupun metode pembelajaran. Selain itu, Dinas Pendidikan menyelenggarakan forum evaluasi bersama kepala sekolah SLB dan sekolah inklusif untuk membahas capaian, hambatan, dan langkah tindak lanjut. Praktik ini mendukung konsep *continuous improvement* dalam manajemen pendidikan, di mana hasil evaluasi menjadi pijakan untuk meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan.

Supervisi juga mencakup pemantauan kesejahteraan guru, ketersediaan alat bantu, dan keterlibatan orang tua. Dalam beberapa kasus, Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi perbaikan lingkungan belajar, misalnya menambah pencahayaan di ruang kelas untuk siswa tunanetra atau menyesuaikan ukuran meja bagi siswa pengguna kursi roda. Langkah-langkah perbaikan ini berdampak pada peningkatan kenyamanan belajar siswa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap capaian akademis maupun keterampilan hidup mereka. Evaluasi yang konsisten membantu Dinas Pendidikan mendeteksi dini berbagai kendala, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum masalah menjadi serius.

Dimensi penting lainnya yang terungkap adalah kolaborasi dan kemitraan multistakeholder. Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus tidak dapat dilakukan secara sepihak. Oleh karena itu, lembaga ini aktif menjalin kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, komunitas orang tua ABK, perguruan tinggi, serta lembaga donor. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan bersama, penyediaan beasiswa, program magang untuk guru, dan kampanye publik tentang pendidikan inklusif. Misalnya, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan komunitas “Sahabat Difabel” untuk menyelenggarakan seminar literasi inklusif yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan orang tua. Kemitraan dengan perguruan tinggi digunakan untuk pengembangan riset dan inovasi media pembelajaran berbasis teknologi. Pendekatan kolaboratif ini memperluas sumber daya dan meningkatkan legitimasi kebijakan pendidikan khusus.

Pembahasan hasil penelitian mengungkap bahwa peran strategis Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah dalam meningkatkan mutu pendidikan khusus sesuai dengan fungsi manajerial pendidikan, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kebijakan berbasis data memungkinkan penentuan prioritas yang lebih tepat, sementara pengembangan kompetensi guru meningkatkan kualitas layanan. Penyediaan sarana prasarana yang ramah disabilitas memperkuat aksesibilitas, sedangkan mekanisme evaluasi memastikan perbaikan

berkelanjutan. Kolaborasi dengan berbagai pihak memperkaya sumber daya dan memperluas jangkauan layanan. Strategi ini secara konseptual sejalan dengan teori manajemen pendidikan modern yang menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai mutu pendidikan.

Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, penelitian juga menemukan sejumlah tantangan yang masih dihadapi. Pertama, distribusi guru pendidikan khusus belum merata. Sebagian besar guru terpusat di kota-kota besar, sementara kabupaten di daerah pedalaman masih kekurangan tenaga pendidik kompeten. Kedua, keterbatasan anggaran membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas lengkap bagi seluruh sekolah inklusif. Ketiga, stigma masyarakat terhadap ABK masih menjadi penghambat utama dalam penerimaan sosial, yang berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah bagi ABK di beberapa wilayah. Keempat, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah terkadang belum sinkron, sehingga implementasi kebijakan di lapangan tidak selalu seragam.

Menghadapi tantangan tersebut, beberapa solusi strategis dapat diusulkan. Pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan afirmatif dalam perekrutan guru pendidikan khusus, misalnya memberikan insentif khusus bagi guru yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh juga dapat mengurangi kesenjangan layanan, misalnya dengan menyediakan modul daring atau layanan *tele-therapy* bagi ABK. Sosialisasi pendidikan inklusif kepada masyarakat harus diperkuat melalui media lokal, seminar, dan kampanye publik untuk mengurangi stigma. Dinas Pendidikan juga dapat menjalin kemitraan lebih erat dengan sektor swasta dan lembaga filantropi untuk menambah dukungan finansial dan program inovasi pendidikan khusus.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah berkontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan khusus, meskipun tantangan struktural dan kultural masih perlu diatasi. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan yang setara, bermutu, dan inklusif. Peran ini tidak hanya memenuhi mandat konstitusi, tetapi juga mencerminkan komitmen moral untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan menghargai keberagaman.

Selain dimensi-dimensi pokok yang telah diuraikan, penelitian ini juga menemukan beberapa praktik baik (*best practices*) yang patut menjadi contoh bagi daerah lain. Salah satunya adalah pembentukan tim kerja pendidikan khusus di tingkat provinsi. Tim ini terdiri dari pejabat struktural Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala SLB, perwakilan sekolah inklusif, serta perwakilan orang tua siswa. Tugas tim adalah merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan program, serta mengawasi jalannya layanan pendidikan khusus. Keberadaan tim kerja mempercepat alur koordinasi dan meminimalkan kebingungan birokrasi. Dengan model kerja kolaboratif ini, kebijakan yang diambil lebih partisipatif karena mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak yang berkepentingan langsung.

Dalam konteks kurikulum, Dinas Pendidikan mendorong penerapan kurikulum diferensiatif yang fleksibel terhadap kebutuhan individu siswa. Kurikulum ini menyesuaikan materi, metode, dan tempo belajar dengan kemampuan anak. Observasi ke beberapa SLB dan sekolah inklusif menunjukkan bahwa guru tidak memaksakan standar capaian akademis yang seragam, melainkan memberikan target perkembangan yang realistis bagi setiap siswa. Misalnya, siswa dengan hambatan intelektual ringan lebih banyak diberi tugas praktik yang mengasah keterampilan hidup seperti merapikan meja, menghitung uang, atau keterampilan vokasional sederhana. Kurikulum diferensiatif semacam ini sejalan dengan prinsip “pendidikan untuk

semua” yang diadopsi UNESCO, di mana keberhasilan tidak diukur hanya dengan capaian akademis tetapi juga kemandirian dan partisipasi sosial.

Pembahasan yang lebih mendalam menunjukkan bahwa strategi-strategi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam kerangka manajemen mutu pendidikan. Perencanaan berbasis data memastikan program sesuai kebutuhan; penguatan SDM menjamin kompetensi pelaksana; sarana dan prasarana mendukung aksesibilitas; evaluasi mengarahkan perbaikan; dan kolaborasi memperluas dukungan. Dengan sinergi ini, mutu pendidikan khusus dapat meningkat secara berkelanjutan. Model pendekatan semacam ini sesuai dengan prinsip *Total Quality Management* (TQM) dalam pendidikan, di mana setiap komponen sistem harus berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dan kepuasan penerima layanan.

Meski demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa komitmen politik dan keberlanjutan anggaran menjadi faktor penentu. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, sulit bagi Dinas Pendidikan untuk menjaga kesinambungan program. Saat ini sebagian besar bantuan pendidikan khusus masih bergantung pada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Fluktuasi anggaran dapat mempengaruhi kelancaran program pelatihan guru, pengadaan alat bantu, dan rehabilitasi fasilitas. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan disarankan untuk memperkuat perencanaan keuangan jangka panjang serta mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerja sama dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan khusus melalui pendekatan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Dinas Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Berbagai strategi telah diimplementasikan, meliputi perencanaan berbasis data, pengembangan sumber daya manusia pendidik, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, pelaksanaan supervisi dan evaluasi berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi lintas lembaga. Keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) menjadi bukti nyata penguatan kelembagaan dalam mendukung akses pendidikan, layanan terapi, ketenagaan, dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. ULD mempertegas peran Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional, yaitu PP Nomor 13 Tahun 2020 dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Selain itu, implementasi kurikulum diferensiatif dan penguatan program pelatihan guru turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu layanan pembelajaran. Sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta dukungan multi-stakeholder menjadikan penyelenggaraan pendidikan khusus di Kalimantan Tengah semakin inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Namun demikian, tantangan seperti ketimpangan distribusi guru, keterbatasan anggaran, dan stigma sosial terhadap ABK masih memerlukan perhatian serius. Untuk itu, diperlukan komitmen politik, dukungan kebijakan berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar penyelenggaraan pendidikan khusus dapat terus berkembang secara merata dan berkeadilan. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mencerminkan praktik manajemen pendidikan modern yang berorientasi pada mutu, inklusivitas, dan keberlanjutan. Melalui strategi tersebut, diharapkan seluruh anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar yang setara, bermutu, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Owa, Y. K., & Wua, M. A. (2023). Implementasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 3(2), 45-57. <https://doi.org/10.55610/jpicb.v3i2.2132>
- Zalni, A., Kurniawati, D., & Rahmawati, A. (2024). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Inklusi. *Jurnal Khirani*, 6(1), 12-22. <https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/KHIRANI/article/view/739>
- Meka, M., Yanti, R., & Damanik, A. (2024). Peran Pendidikan Inklusif dalam Mengatasi Masalah Sosial Anak Berkebutuhan Khusus: Tinjauan Literatur. *Jurnal Pendas*, 7(2), 101-115. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/17375>
- Supriyanto, A., & Nurmalasari, Y. (2022). Strategi Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 33-47. <https://doi.org/10.17509/jmp.v14i1.34567>
- Hidayat, R., & Sari, P. (2021). Manajemen Pendidikan Khusus: Tantangan dan Peluang di Era Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Khusus Indonesia*, 2(3), 77-88. <https://doi.org/10.36765/jpki.v2i3.102>
- Bayu Kurniawan, Laikha Listiyani, Siti Fatimah, Minsih, Ernawati. *Strategi Pendidikan Inklusi terhadap Perkembangan Akademik Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Vol. 9 No. 2, 2023
- Pujaningsih. *Penyiapan Calon Guru untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Tantangan. JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)* Vol. 15 No. 1, 2024.
- Komarudin & Nor Faizah Kaeni. *The Obstacles of Inclusive Education Implementation in Indonesia: A Systematic Review. GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling* Vol. 12 No. 3 (2022-2023).
- Ringgi Rahmat Fitra, Rochmat Wahab, Hana Andringrum. *Implementation of The Education Curriculum For ABK. Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* Vol. 7 No. 1, 2024.
- Rena Khoqifah, Sunardi, Tias Martika. *Implementation of an Inclusive Education Service Model for Children with Special Needs at Al Firdaus Elementary School in Surakarta. Jurnal Pendidikan Inklusif* Vol. 8 No. 1, 2023/2024.
- Fitriani, Sutaryat Trisnamansyah, Husen Saeful Insan. *Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. 5 No. 3, 2023.
- Ratna Sari Wulandari & Wiwin Hendriani. *Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia (Suatu Pendekatan Systematic Review). Jurnal Kependidikan* Vol. 7 No. 1, 2024.
- Tisya Khairunnisa, Martono, Nurul Azizah, Siti Aniqatul Albar, Grady Wallace Raines. *Inclusive Education Learning Process in Islamic Religious Education Subjects for Children with Special Needs. Ri'ayatu Al-Qur'an* Vol. 6 No. 2, 2024.
- Anisa Eka Wulandari, Baharuddin, M. Indra Saputra, Umi Hijriah, Agus Faisal Asyha. *Pendidikan Inklusif pada Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia: Tinjauan Literatur Analisis Bibliometrik. Action Research Journal Indonesia (ARJI)* Vol. 7 No. 1, 2024
- Dewi, W. P., Sudadio, S., & Fadlullah, F. *Implementasi Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jenjang SMP di Kota Tangerang. Journal of Education Research* Vol. 5 No. 1, 2024.